



Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial

Yustinus Vicensius Tommy¹⁾, Anis Rachma Utary²⁾, Bramantika Oktavianti³⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman ^{1,2,3)}
Jalan Tanah Grogot, Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp.0541-748915 Fax 0541-743916
Email: bramantika.oktavianti@fe.unmul.co.id³⁾

Abstract

This study aims to look at the effect of the number of commissioners as well as the audit committee of a number of mining companies related CSR activities as a form of the company's concern expressed by the stakeholders that the company's annual report. Analysis of instruments used is multiple regression analysis to test the hypothesis, the t-statistic to examine partial regression coefficient also f-statistic to test the effect corresponding to the 5% significance level. The next test will be performed classical assumption of normality test, and the correlation test. The results showed that the size of the board of directors and audit committees have a significant relationship to corporate social responsibility. This shows if the number of members of the board of directors and audit committee can improve the disclosure of corporate social responsibility, especially in the company mines located in Indonesia

Keyword: CSR, Board of Commissioners and Audit Committee.

1. PENDAHULUAN

Hal yang melatarbelakangi munculnya sebuah mekanisme untuk mengatasi ketimpangan dalam sikap tata kelola dan keberlanjutan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong terciptanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya adalah kurangnya kepedulian perusahaan dalam melakukan tata kelola usaha yang berfokus pada kelangsungan usaha dan hubungan yang dihasilkan antara perusahaan dan *stakeholder* (Prio, 2011). Hal tersebut merupakan kelemahan dari proses dan mekanisme suatu perusahaan. Kondisi demikian akhirnya menyebabkan implementasi GCG menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas serta mengambil sikap peduli terhadap lingkungan yang ada disekitar perusahaan. Perlindungan tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dijalankan didalam GCG yaitu *fairness, disclosure and transparency, accountability, responsibilities dan independency*.

Kepedulian perusahaan juga dapat dilihat dari komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya yang tercermin dalam tiga dimensi utama yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya merupakan wujud dari pertanggungjawaban perusahaan yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut *The World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) CSR adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keprilakuan (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*) (Azheri, 2011). Sedangkan motivasi utama perusahaan dalam mengimplementasikan CSR adalah untuk meningkatkan citra (*image*) positif dari masyarakat luas (Effendi, 2009).

Kondisi tersebut sejalan dengan *teori legitimasi* yang menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin terlegitimasi. Dengan kata lain teori tersebut merupakan landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat perusahaan tersebut melangsungkan kegiatannya (Kartini, 2013).

Namun, permasalahan yang saat ini dihadapi oleh sejumlah pihak yaitu adanya fakta empiris yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang bergantung pada

lingkungan hidup terutama perusahaan pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara masih banyak yang tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dan kurang memahami serta menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Perusahaan-perusahaan ini malah merusak tatanan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Seperti kasus lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan lain sebagainya.

Sudah seharusnya perusahaan menciptakan “*positif image*” terhadap *stakeholders*-nya. Salah satu cara adalah dengan menerapkan prinsip CSR dalam aktivitas dunia usaha sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG. Hal ini terbukti secara jelas dalam praktek dan realita dari PT. ANTAM Tbk, yang pada tahun 2013 meraih peringkat tertinggi dalam survey peringkat GCG yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) dan dinobatkan sebagai salah satu perusahaan dengan predikat *The Most Trusted Company*. Hal ini pun terjadi pada tahun 2014, dimana perusahaan sadar bahwa dengan kegiatan utama perusahaan yaitu aktivitas pertambangan akan selalu bersinggungan dengan lingkungan, maka sudah seharusnya perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Banyaknya kasus perusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan, terutama pada aktivitas tambang yang berlokasi di provinsi Kalimantan Timur, khususnya aktivitas tambang di Kota Samarinda dan sekitarnya yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik. Kondisi hal tersebut, tercermin dari sejumlah kasus yang timbul sebagai akibat dari dampak buruk aktivitas pertambangan yang diantaranya adalah banjir, rusaknya sejumlah ekosistem, gagal panen yang diakibatkan debu pertambangan yang berlokasi didekat pemukiman warga dan masih banyak lagi. Alasan-alasan dari sejumlah permasalahan tersebutlah yang akhirnya menjadi dasar motivasi untuk dilakukannya riset ini.

Riset ini hendak mengkaji dan menguji pengaruh implementasi GCG yang diwakili oleh keberadaan dewan komisaris dan komite audit pada perusahaan pertambangan terhadap luas pengungkapan CSR pada sejumlah perusahaan tambang yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan dilakukannya riset ini yaitu adanya keyakinan bahwa dari suatu pelaksanaan mekanisme GCG yang baik akan mendorong perusahaan dalam pelaksanaan CSR yang secara tidak langsung akan menjalankan salah satu prinsip utama yaitu *responsibility* dan secara langsung bersinggungan dengan *stakeholders* (Kartini, 2013). Pernyataan inilah yang menjadi dasar tujuan riset ini, karena tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dan kreditur, namun harus memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yaitu masyarakat dan lingkungan (*triple bottom line*).

2. TELAHAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agency

Agency Theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari (Sutedi, 2011). Untuk memahami *corporate governance*, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (*agency theory*). Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dan hubungan *agent* dengan *principal* (pemegang saham) atau *principal* dengan *principal*. Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara *agent* dengan *principal*.

Sesuai dengan prinsip teori agensi, manajer sebagai agen berusaha memenuhi kepentingan para *shareholder* (prinsipal) antara lain dengan meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kelangsungan operasi perusahaan supaya perusahaan dapat bertahan lama. Oleh karena itu, untuk mencapainya manajer juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya fungsi dari agen (manajer) itu juga harus bisa menyeimbangkan antara wewenang yang diberikan kepada manajer perusahaan dan kepentingan *stakeholder*.

2.2. Teori Legitimasi

Hal melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Chariri, 2007). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa keberadaan dan aktifitasnya akan mendapat “status” dari masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi atau dapat dikatakan terlegitimasi.

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba

perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR

Konsep teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholder*, dan bukan hanya kepentingan pemegang saham (*shareholders*) (Deegan, 2004). Untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial.

Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk pelaksanaan tugasnya secara mandiri dan kritis (KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 16 ayat 1). Peraturan mengenai ukuran dewan komisaris tercantum dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 Ayat (5), yang bunyinya adalah: "Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat". Oleh karena itu semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah mengedalikan *Chief Executive Officer* (CEO) dan monitoring manajemen yang terkait tanggung jawab perusahaan akan semakin efektif (Beasley, 2001).

Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Prio (2011) dan Rahmawati (2011) yang meneliti hubungan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun pengamatan yang berbeda. Dengan demikian dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas Pengungkapan CSR Perusahaan

2.3.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR

Menurut FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Pengaturan jumlah komite audit diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Tahun 2004, komite audit terdiri sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya ukuran komite audit yang tepat pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan (Effendi, 2009). Terkait dengan pengungkapan informasi tanggung jawab social perusahaan, maka dengan semakin besarnya komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan semakin meningkatkan kualitas dari informasi dalam laporan perusahaan yang dalam hal ini adalah pengungkapan informasi tanggung jawab perusahaan.

Hipotesis dalam riset ini diperkuat dengan riset sebelumnya yang dilakukan oleh Mulia (2010) dan Kiswara (2013). Hasil riset tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara ukuran komite audit yang dimiliki perusahaan dengan pengungkapan CSR pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi riset ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2013 sebanyak 38 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 4 Sub sektor pertambangan yaitu subsektor pertambangan batubara, subsektor pertambangan batu-batuan, subsektor pertambangan logam dan mineral lain, dan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan sejumlah kriteria yaitu, perusahaan terdaftar di BEI selama 3 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2011-2013 selama masa pengamatan riset, perusahaan bergerak di bidang pertambangan dan jasa pertambangan (*Mining & Mining Services*), perusahaan mempublikasikan laporan tahunan termasuk pengungkapan sosial lingkungan dan tersedia untuk public, terakhir perusahaan memiliki data lengkap baik dari segi data GCG maupun data pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil penyaringan populasi sesuai dengan kriteria, maka diperoleh 20 perusahaan yang

menjadi sampel riset.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam riset ini berupa angka dalam indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai yang diinterpretasikan dari jumlah atau ukuran elemen GCG yang menjadi variabel independen. Pertama adalah data komposisi dan ukuran dewan komisaris serta ukuran komite audit. Sedangkan data kedua berasal dari laporan tahunan perusahaan (*annual report*) selama masa pengamatan yang berupa indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikembangkan oleh Sembiring (2005) dari penelitian Hackston (1996).

Alasan dipilihnya periode laporan tahunan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sebagai objek riset dikarenakan pada periode tersebut dapat mewakili kondisi dari dampak implementasi GCG perusahaan sektor pertambangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Riset ini menggunakan metode studi dokumentasi dalam mengumpulkan data, dengan cara mengakses informasi yang dibutuhkan melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni *www.idx.co.id* dan *Indoneian Capital Market Directory* (ICMD).

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial (Y)

Variabel dependen dalam riset ini adalah pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan yang dilihat dari persentase indeks pengungkapan pada masing-masing perusahaan. Indeks Pengungkapan disini merupakan butir laporan CSR minimum yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang diatur secara rinci menurut *Global Report Initiative* (GRI). Sedangkan pengungkapan CSR menggunakan *Content Analysis* yang dikembangkan oleh Hackston (1996) dan disesuaikan dengan peraturan Bapepam No. VIII.G.2. tentang laporan tahunan. Ketujuh kategori tersebut adalah lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum, yang diadopsi dari riset yang dilakukan oleh Hackston (1996).

3.4.2 Ukuran Dewan Komisaris (X₁)

Deegan (2004:292) mengemukakan, untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah mengendalikan *Chief Executive Officer* (CEO) dan monitoring manajemen yang terkait tanggung jawab perusahaan akan semakin efektif (Beasley, 2001). Dalam riset ini ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan (Sembiring, 2005).

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \sum \text{anggota komisaris}$$

3.4.3 Ukuran Komite audit (X₂)

Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan, sehingga dengan adanya ukuran komite audit yang tepat pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan (Effendi, 2009). Variabel komite audit dalam riset ini diadaptasi dari Kiswara (2013) yang diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan berdasarkan jumlah keseluruhan komite audit yang dimiliki perusahaan tersebut.

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \sum \text{anggota komite audit}$$

3.5. Analisis Data

Analisis data dalam riset ini menggunakan Model Persamaan Regresi Berganda dengan melakukan uji statistik deskriptif yang terdiri dari uji asumsi klasik dengan melalui tahapan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, untuk selanjutnya dilakukan tahapan uji F dan kemudian dilakukan analisis regresi berganda serta Uji Hipotesis yang mencakup uji-t serta mengukur koefisien determinasi (R^2). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Software SPSS Versi 20 (2014).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 berikut menunjukkan hasil dari pengujian variabel deskriptif riset dari sample sebanyak 20 perusahaan selama 3 tahun.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Riset

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR Indeks	60	.18	.96	.6500	.22994
Ukuran Dewan Komisaris	60	2.00	13.00	5.1167	2.42230
Ukuran Komite Audit	60	3.00	6.00	3.4000	.84773
Valid N (<i>listwise</i>)	60				

Sumber: data sekunder diolah melalui SPSS 20, 2014

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, diperoleh hasil sebagai berikut, variable CSRI memiliki rentang nilai dari 0.18 hingga 0.96. Nilai rata-rata CSRI 0.655 dan deviasi standarnya bernilai 0.229. Jika dilihat dari nilai rata-rata variabel CSRI, dapat diperoleh fakta jika rata-rata jumlah item yang diungkapkan oleh para emiten kurang lebih mencapai 0.655 atau 51 dari 78 item pengungkapan.

CSRI yang bernilai mendekati 1 mempunyai arti bahwa perusahaan mengungkapkan lebih banyak kategori CSR dalam laporan tahunannya, yang berarti perusahaan tersebut semakin peduli dan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan CSR kepada para *stakeholder*. Hal tersebut membuktikan jika teori legitimasi yang menyebutkan bahwa perusahaan akan melakukan legitimasi kegiatan CSR dalam bentuk pengungkapan CSR pada laporan tahunannya sebagai bentuk pemenuhan peraturan perundangan-undangan seperti yang tercantum dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam untuk melakukan CSR.

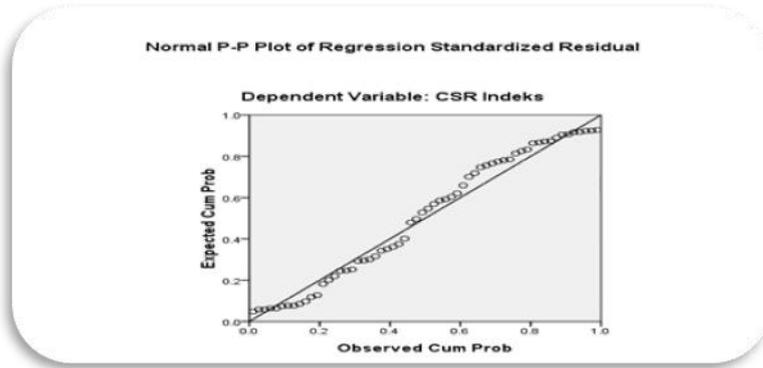
4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas pada tabel 2 terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 0.780 dan signifikan pada 0.577 dengan asumsi $0.577 \geq 0,05$ menunjukkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data dengan Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		600
Normal Parameters ^a	Mean	0,13409358
	Std. Deviation	0,101
	Asymptotic Significant	0,077
Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	-0,101
		0,78
		0,577

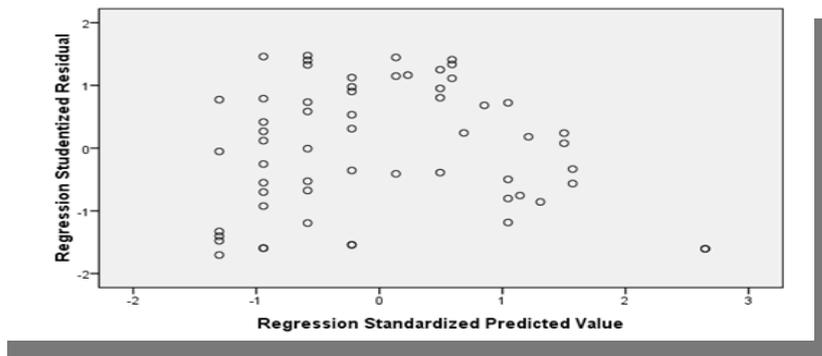


Hasil ini juga diperkuat oleh Grafik P-P Plot Pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, yaitu nilai standardized residual berhimpit atau tersebar dekat disekitar garis 45⁰ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memenuhi asumsi normalitas.

4.1.2.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola grafik *scatterplot* yang tampak pada gambar 2 berikut.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas *Dependent Variabel: CSR Indeks*



Dari gambar 2 tampak bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak menunjukkan pola tertentu. Titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

4.1.2.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dilihat dari nilai toleran dan *Variance Inflation Factor* atau VIF nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai toleran 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 sehingga data yang tidak terkena multikolinearitas nilai toleransinya harus lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.018	.078		.226	.822		
	Ukuran Dewan Komisaris	.067	.007	.706	9.050	.000	.980	1.021

	Ukuran Komite Audit	.085	.021	.314	4.019	.000	.980	1.021
--	---------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

Hasil pengujian *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yaitu sebesar 0.98. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dalam riset ini nilai VIF berada pada nilai 1,201 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolerasi antara variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit dalam model regresi.

4.1.2.4. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian menggunakan uji *Durbin Watson* yang hasilnya ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut. Nilai DW sebesar 2.049, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%. Untuk jumlah sampel n=60, nilai d1=1,514 dan du=1,652. Oleh karena nilai DW 2,049>1,652 dan <2,348 (4-1.652), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.812 ^a	.660	.648	.13643	2.049

a. Predictors: (Constant), Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris

b. Dependent Variabel: CSR Indeks

Sumber: data sekunder diolah melalui SPSS 20, 2014

4.1.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

4.1.3.1. Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai F=55,306 dengan probabilitas sebesar 0.000<0,05. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari $\alpha=0.05$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama indeks pengungkapan CSR dapat dijelaskan oleh variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit

Tabel 5. Hasil Uji F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.059	2	1.029	55.306	.000 ^a
1 Residual	1.061	57	.019		
Total	3.120	59			

a. Predictors: (Constant), Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: CSR Indeks

Sumber: data sekunder diolah melalui SPSS 20, 2014

4.1.3.2. Analisis Regresi Berganda

Atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan sebesar tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$CSRI = 0,018 + 0,067 UDK + 0,085 UKA + e$$

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.018	.078		.226	.822
	Ukuran Dewan Komisaris	.067	.007	.706	9.050	.000

	Ukuran Komite Audit	.085	.021	.314	4.019	.000
--	---------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: CSR Indeks

Sumber: data sekunder diolah melalui SPSS 20, 2014

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 0,018, menunjukkan bahwa Y mempunyai nilai 0,018 apabila variabel X₁ dan X₂ dianggap konstanta.
- Nilai koefisien X₁ sebesar 0,067 dan memiliki pengaruh yang signifikan. Mengandung arti bahwa setiap kenaikan X₁ sebesar 1 orang anggota dewan komisaris akan diikuti dengan kenaikan Y sebesar 0,067 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.
- Nilai koefisiens X₂ sebesar 0,085 dan memiliki pengaruh yang signifikan. Mengandung arti bahwa setiap terjadi kenaikan X₂ sebesar 1 orang komite audit maka Y akan naik sebesar 0,085 dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dari model regresi adalah tetap.

Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat ≤ 0.05 . Kondisi demikian mengindikasikan jika pengaruh dari peningkatan ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit perusahaan akan meningkatkan CSR *disclosure* perusahaan sektor pertambangan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *adjusted* R^2 sebesar 0.648. Hal ini berarti bahwa 64.8% variasi indeks pengungkapan CSR dapat dijelaskan oleh ukuran dewan komisaris perusahaan dan ukuran komite audit, sedangkan 35.2% ($100\% - 64,8\% = 35.2\%$) indeks pengungkapan CSR dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Nilai $R=0.812$ menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 81.2%. Dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit yang menjadi proksi GCG dengan pengungkapan CSR yang diukur dengan indeks pengungkapan sosial memiliki posisi yang cukup kuat.

Tabel 7. Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 ^a	.660	.648	.13643	2.049

a. Predictors: (Constant), Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: CSR Indeks

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pembahasan dari Uji Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama dalam riset ini adalah untuk menguji apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian menunjukkan jika nilai t sebesar 9.050 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000 berada lebih rendah pada $\alpha=0,05$ sehingga hipotesis pertama diterima. Selain itu dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris yang dimiliki perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hipotesis ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan informasi CSR.

Dikaitkan dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan informasi CSR. Ketika terjadi peningkatan pengungkapan CSR maka akan meningkatkan beberapa hal, antara lain ialah meningkatkan citra perusahaan yang positif dari masyarakat luas, pengelolaan resiko, dan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (Effendi, 2009:367.)

Selain itu pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan

manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya, sehingga kebanyakan riset menunjukkan adanya hubungan positif antara dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan.

Apabila pengungkapan terhadap CSR yang dilakukan oleh perusahaan meningkat, maka hal tersebut akan memberi dampak positif dalam beberapa hal, antara lain ialah meningkatkan citra perusahaan yang positif dari masyarakat luas, pengelolaan resiko, dan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis. Argumen tersebut sesuai dengan riset-riset sebelumnya yaitu Sembiring (2005), Prio (2011) dan Rahmawati (2011).

4.2.2 Pembahasan dari Uji Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dalam riset ini adalah untuk menguji apakah ukuran komite audit yang dimiliki oleh perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR. Hasil penelitian menunjukkan nilai t sebesar 4.019 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah dari $\alpha=0.05$ sehingga pada pengujian hipotesis kedua, hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit yang dimiliki oleh perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR pada riset ini menunjukkan bila ukuran komite audit memiliki hubungan positif dan memiliki nilai signifikan.

Hasil riset ini konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Handajani (2008) dan Kiswara (2013) yang menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan CSR. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan pengungkapan lingkungan perusahaan. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen perusahaan.

Riset ini juga menolak hasil riset yang dilakukan oleh Badjuri (2011) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit yang beragam tidak dapat mempengaruhi pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Ia berpendapat bahwa ukuran komite audit hanyalah mekanisme internal yang mempertimbangkan asas konservatif dari informasi perusahaan artinya keberadaan komite audit hanyalah menjadi "hiasan" GCG belaka tanpa mempertimbangkan pihak *stakeholder* perusahaan karena komite audit tidak memihak kepada siapapun.

Hipotesis yang diajukan mendukung teori Model GCG yang menyatakan jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan pengungkapan lingkungan perusahaan kepada pihak eksternal dan para *stakeholder* perusahaan. Informasi CSR yang disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan akan di pertanggungjawabkan oleh direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komite audit yang bertugas sebagai fungsi pengawasan dan pemberi saran sebagai tenaga ahli yang kompeten dan independen akan menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan manajemen yang dalam hal ini terkait kegiatan CSR perusahaan.

Selanjutnya laporan yang berisi informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi komite audit dan sebagai dasar dalam pengawasan penyusunan anggaran kegiatan CSR maupun tindakan lain yang berhubungan dengan *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu, semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen perusahaan.

Lebih lanjut teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dari teori tersebut kemudian lahir konsep CSR. Konsep CSR menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia melakukan pengungkapan sosial dalam laporan tahunannya sebesar 0.65 atau 51 item pengungkapan. Hal ini berarti pengungkapan sosial perusahaan pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan secara terus menerus. Peningkatan paling nyata terjadi pada tahun 2012, pada saat semakin gencarnya dunia usaha khususnya bidang mineral dan pertambangan mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan dalam kegiatan usahanya. Kegiatan ini dilakukan dengan banyak cara seperti kebijakan penggunaan energi perusahaan yang ramah lingkungan, kegiatan beasiswa, kegiatan penunjuang kesehatan dan kegiatan kepedulian lingkungan lainnya.

Gerakan peduli lingkungan juga diperkuat dengan beberapa peraturan pemerintah serta UU yang membahas dan mewajibkan kegiatan CSR pada perusahaan terutama yang kegiatan usahanya berhubungan dengan CSR seperti PP No.47 Tahun 2012 yang membahas tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi tindak lanjut UUPT No.40 tahun 2007. Motivasi lain yang menjadi dasar peningkatan kegiatan dan pengungkapan CSR adalah dengan adanya peningkatan award yang dapat diterima perusahaan atas kinerja dan pengungkapan CSR seperti penghargaan PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup, *Sustainability Report Award*, CSR Award dan lain-lain yang meningkatkan *corporate image* dan menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang memenangkan award tersebut.

5. SIMPULAN DAN KETERBATASAN SARAN

5.1 Simpulan

Secara parsial ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan demilkian perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris yang besar akan mengungkapkan informasi CSR lebih banyak daripada perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris yang lebih kecil. Hasil riset ini mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saham (*shareholders*). Dengan pengungkapan informasi CSR, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* serta dapat mengelola para *stakeholder* agar mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Secara parsial ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sehingga perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak cenderung memberikan pengungkapan sosial yang semakin besar. Hasil ini mendukung teori yang menyatakan bahwa jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektivitas pengawasan termasuk praktik dan pengungkapan CSR. Selain itu semakin besarnya ukuran komite audit maka akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen perusahaan.

5.2. Keterbatasan Riset

Keterbatasan dalam riset ini adalah terletak pada sampel riset yang terbatas serta perolehan data yang bersumber dari BEI dan ICMD yang masih terbatas hanya pada pengamatan sekunder. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pengamatan sehingga belum memperoleh hasil yang komprehensif. Dalam melakukan *analysis* adanya keterbatasan informasi dapat mengakibatkan informasi fenomena dan kondisi menjadi kurang memuaskan.

5.3. Saran Riset Kedepan

Bagi periset yang akan melakukan pengamatan terkait GCG dan CSR dengan menggunakan data sekunder pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, sebaiknya dilakukan dengan mengkombinasikan antara data primer yang berupa pengamatan langsung (observasi) dengan kata lain menggunakan *mix method system* untuk memperoleh hasil yang akurat, selain itu untuk pemilihan sampel risetnya khususnya penentuan tahun penelitian agar diperluas.

Saran selanjutnya yaitu agar para periset berikutnya dapat menambah variabel-variabel GCG lainnya untuk mendeskripsikan dampak implementasi GCG seperti ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, sekertaris perusahaan dan komite lain yang membantu pelaksanaan GCG. Terakhir alangkah baiknya periset juga menggunakan *Sustainability Report* yang dibuat oleh pihak manajemen sebagai dasar laporan CSR sebagai objek riset agar lebih menggambarkan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan.

REFERENSI

- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beasley, M. dan S. Salterio. 2001. "The Relationship Between Board Characteristics and Voluntary Improvements in Audit Committee Composition and Experience". http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=272590 & diakses tanggal 5 Juli 2014.
- Deegan, C. 2004. "Introduction the Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure—a Theoretical Foundation". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 15 No. 3 pp. 282-311.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahrizqi, Anggara. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Forum Corporate Governance Indonesia. 2002. "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)". Jakarta.
- Hackston, David and Milne, Marcus J., (1996). "Some Determinants Of Social And Environmental Disclosures In New Zealand Companies", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 9, No. 1, pp. 77-108.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

- Ghozali, Imam. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulastini, S. 2007. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Social Disclosure* Perusahaan Manufaktur Yang Telah *Go Public*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (tidak dipublikasikan).
- Yustiavandana, Surya I & Nefi, A. 2008. *Penerapan good corporate governance: mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*. Kencana: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tjager, I Nyoman., et al. 2003. *Good Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta:Prehalindo.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Utami, Indah Dewi dan Rahmawati. 2011. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 21(3): h:297-306.
- Yuliana, R et al. 2008. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Reaksi Investor*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. 5 (2) Desember: pg:245-276.
- www.idx.co.id diakses pada tanggal 03 Juni 2014
- www.indonesiancamel.com diakses pada tanggal 20 Mei 2014
- www.madani-ri.com diakses pada tanggal 23 April 2014
- www.wikipedia.co.id diakses pada tanggal 10 April 2014